

TUGAS PAPER

ORGANISASI INTERNASIONAL & GLOBALISASI

**PENGARUH GLOBAL GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PELAYANAN BP3MI
DALAM PROGRAM MBKM**



Disusun Oleh:

Nama: Amalda Ika Nabila Azzachra

NPM: 2316041121

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja antarnegara di era globalisasi menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin perlindungan serta kualitas pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peran tersebut dijalankan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui unit pelaksana di daerah yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Keberadaan BP3MI sangat penting dalam memastikan proses penempatan, perlindungan, serta pelayanan administratif PMI agar berjalan sesuai prosedur. Tingginya jumlah PMI yang ditempatkan setiap tahun menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, berbagai permasalahan seperti kekerasan, eksploitasi, hingga penempatan ilegal masih sering terjadi, kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang migrasi tenaga kerja membutuhkan sistem yang kuat dan terintegrasi (Permana,2018).

Dalam menjalankan tugasnya, BP3MI tidak hanya bekerja dalam lingkup nasional, tetapi juga berada dalam sistem global yang kompleks yang dikenal sebagai global governance. Global governance merupakan konsep yang menggambarkan aturan, norma, dan mekanisme kerja sama antarnegara tanpa adanya satu otoritas tunggal. Konsep ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi internasional, dan sektor non-negara dalam mengatur isu global, termasuk perlindungan tenaga kerja migran. Dalam perspektif kritis, global governance juga dipahami sebagai bentuk pengaturan perilaku melalui norma global seperti hak asasi manusia dan standar internasional. Hal ini terlihat dari adanya standar perlindungan pekerja migran yang mengacu pada International Labour Organization. Dengan demikian, kebijakan dan pelayanan BP3MI tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global governance yang membentuk arah perlindungan PMI. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam global governance, khususnya dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa berkesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik pelayanan publik di BP3MI. Dalam kegiatan magang ini, mahasiswa berperan dalam input data layanan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), membantu layanan SSW (Specified Skilled Worker), serta membantu proses pendaftaran online PMI. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa turut berkontribusi dalam mendukung digitalisasi pelayanan yang menjadi bagian dari tuntutan global. Dalam konsep e-government, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Rachmad et al., 2024). Keterlibatan mahasiswa dalam proses ini secara tidak langsung memperkuat implementasi tata kelola modern berbasis teknologi. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem global diterapkan dalam

pelayanan publik di tingkat lokal yang menunjukkan bahwa program MBKM memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan administrasi negara.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh global governance terhadap kinerja pelayanan BP3MI serta bagaimana perannya dalam mengatasi berbagai hambatan pelayanan PMI. Pertanyaan ini penting karena pelayanan publik saat ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan terhubung dengan sistem global yang kompleks. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh global governance terhadap kinerja BP3MI serta mengidentifikasi perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi negara. Dengan demikian, pembahasan akan difokuskan pada hubungan antara global governance dan kinerja pelayanan BP3MI dalam praktik nyata.

PEMBAHASAN

Global governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan BP3MI, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja, kerja sama internasional, dan digitalisasi layanan. Global governance mendorong adanya standar pelayanan yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sejalan dengan konsep e-government yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (Rachmad et al., 2024). Implementasi sistem seperti OPP dan SSW merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan global agar pelayanan menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses. Selain itu, BP3MI juga harus mengikuti regulasi internasional dalam penempatan PMI melalui kerja sama bilateral dengan negara tujuan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga standar global, menunjukkan bahwa global governance berperan sebagai kerangka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari perspektif collaborative governance, perlindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai aktor. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, serta masyarakat sebagai penerima layanan dalam mencapai tujuan bersama (Putro et al., 2024). Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan kepentingan antar stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance belum sepenuhnya optimal. Selain itu, dari sisi kelembagaan juga masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang menangani PMI. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya pelayanan dan perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih jelas dan terintegrasi.

Hambatan dalam praktik pelayanan di BP3MI masih sering ditemukan di lapangan, salah satu contohnya adalah kasus PMI yang mengalami kekerasan oleh majikan di luar negeri, yang menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja masih menjadi tantangan global. Selain itu, terdapat juga kasus PMI yang berangkat melalui jalur ilegal dan akhirnya harus menjalani hukuman penjara selama dua bulan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Setelah kembali, PMI tersebut kemudian mendaftarkan diri di BP3MI agar statusnya menjadi legal. Kasus lain yang sering terjadi adalah kesulitan calon PMI dalam melakukan pendaftaran online akibat rendahnya literasi digital. Akibatnya, mereka harus datang langsung ke kantor BP3MI untuk mendapatkan bantuan dalam proses administrasi. Berbagai kasus ini menunjukkan bahwa pelayanan BP3MI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus responsif terhadap kondisi nyata masyarakat.

Global governance berperan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui standarisasi sistem, kerja sama internasional, dan transformasi digital. Standarisasi sistem membantu memastikan bahwa data PMI terintegrasi dengan baik sehingga memudahkan pengawasan dan perlindungan. Kerja sama dengan negara tujuan juga menjadi penting dalam penyelesaian kasus hukum dan perlindungan PMI di luar negeri. Transformasi digital melalui sistem pendaftaran online memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, e-government berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, BP3MI dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa global governance memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan pelayanan PMI.

Salah satu bentuk implementasi nyata global governance dalam pelayanan BP3MI adalah alur layanan SSW Mandiri yang berbasis digital dan terintegrasi. Proses ini dimulai dari pendaftaran online yang dapat dilakukan secara mandiri oleh PMI, baik dari rumah maupun di kantor BP3MI. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh staf layanan penempatan untuk memastikan kelengkapan data. Setelah itu, PMI melakukan pembayaran BPJS kepada petugas sebagai bentuk perlindungan sosial. Kemudian, PMI diberikan penjelasan terkait proses pengunggahan visa agar status E-ID dapat berubah menjadi E-PMI. Setelah semua proses selesai, PMI diminta untuk menandatangani daftar hadir dan menerima toolkit berupa alat tulis seperti buku catatan dan pulpen. Pada tahap akhir, PMI mengisi survei kepuasan sebagai bentuk evaluasi pelayanan. Alur ini menunjukkan bahwa pelayanan BP3MI telah berjalan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan prinsip global governance.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa global governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan BP3MI. Pengaruh tersebut terlihat dalam penerapan standar internasional, digitalisasi layanan, serta kerja sama antarnegara

dalam penempatan dan perlindungan PMI. Global governance tidak hanya berperan dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga mempengaruhi praktik pelayanan di tingkat operasional. Keterlibatan mahasiswa melalui program MBKM menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik, membuktikan bahwa global governance menjadi kerangka utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan BP3MI.

Global governance juga berperan dalam membantu BP3MI mengatasi berbagai hambatan pelayanan yang dihadapi. Kasus PMI yang mengalami kekerasan, penahanan akibat jalur ilegal, serta kesulitan dalam pendaftaran online menunjukkan bahwa pelayanan harus bersifat adaptif dan responsif. Transformasi digital melalui sistem SSW Mandiri menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, keberhasilan sistem ini juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan PMI. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi negara harus mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, BP3MI perlu terus mengembangkan sistem digital yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, edukasi kepada calon PMI mengenai prosedur resmi harus ditingkatkan agar dapat mengurangi praktik ilegal. Penguatan kerja sama internasional juga menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan perlindungan PMI di luar negeri. Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan harus terus dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem yang berbasis teknologi dan terintegrasi, pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan administrasi negara yang semakin modern dan berbasis digital, pelayanan kepada PMI dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamler & Handoko, D. (2024). Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Permana, R. D. (2018). Globalisasi dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Kritis Terhadap Wacana Global Governance dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(1).
- Putro, W. E., Larasati, E., Wijayanto., & Yuwanto. (2024). Collaborative Governance in Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRA)*.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor. (2024). *Layanan dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep dan Penerapan*. PT Green Pustaka Indonesia.